

BAB IV

ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan gambaran umum kondisi Jawa Timur pada bab sebelumnya terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang dapat dirangkumkan dalam tabulasi per urusan sebagai berikut : Secara lebih detail, permasalahan pembangunan daerah per urusan dapat dilihat dalam tabel berikut :

| No | Urusan | Permasalahan |
|----|-------------------|--|
| 1. | Pendidikan | <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah angka buta huruf masih tinggi2. Rendahnya APK dan APM di tingkat pendidikan menengah3. Kurangnya sarana prasarana pendidikan menengah kejuruan;4. Belum setaranya pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum;5. Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik pada pendidikan khusus dan layanan khusus (untuk semua jenjang pendidikan) di Jawa Timur;6. Belum optimalnya pendataan semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia sekolah di Jawa Timur berkesempatan menikmati layanan pendidikan yang sesuai;7. Belum meratanya penyebaran guru antara kota dan desa;8. Belum semua Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengikuti peningkatan kompetensi; |

| No | Urusan | Permasalahan |
|----|-----------------------|---|
| | | 9. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT). |
| 2. | Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya kesehatan masih belum terjangkau masyarakat 2. Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama bagi kelompok penduduk miskin, tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular 3. Angka kematian ibu dan anak (AKI dan AKB) masih relatif tinggi 4. Belum optimalnya penanganan gizi buruk |
| 3. | Pekerjaan Umum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Turunnya daya dukung area resapan air (run off yang berlebihan) 2. Turunnya kapasitas fungsi infrastruktur penampung air 3. Menurunnya tingkat layanan prasarana sumber daya air, dari waktu ke waktu 4. Lambatnya progres Pembebasan tanah pada lahan milik perhutani; 5. Meningkatnya lahan Kritis pada Daerah Aliran Sungai/DAS 6. Tingginya Laju alih fungsi lahan pada sawah/irigasi teknis 7. Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang signifikan, baik jalan |

| No | Urusan | Permasalahan |
|----|-----------|--|
| | | <p>Nasional Tol/Non Tol dan Flyover serta Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>8. Keterbatasan alokasi pembiayaan penambahan panjang jalan provinsi;</p> <p>9. Kejenuhan jalan kalinak-tambak osowilangun yang menjadi akses ke Pelabuhan Teluk Lamong</p> <p>10. Keterbatasan pendanaan</p> <p>11. Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air.</p> <p>12. Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air.</p> <p>13. Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan</p> <p>14. Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage),</p> <p>15. Belum optimalnya pengurangan genangan banjir di kawasan perkotaan</p> |
| 4. | Perumahan | <p>1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau,</p> <p>2. Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan,</p> <p>3. Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST dan kawasan</p> |

| No | Urusan | Permasalahan |
|----|--------------------------------|---|
| | | permukiman perdesaan |
| 5. | Penataan Ruang | <ol style="list-style-type: none">1. Belum tersedianya rencana rinci tata ruang (kawasan strategis dan rencana detail tata ruang)2. Belum optimalnya perwujudan Nilai Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang3. Belum optimalnya rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pembangunan didaerah |
| 6. | Perencanaan Pembangunan | <ol style="list-style-type: none">1. Belum sinkron dan tersedianya data2. Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan3. Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan perencanaan pembangunan |
| 7. | Perhubungan | <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Rencana Induk Provinsi terkait pengembangan Kereta Api, Bandara dan Pelabuhan2. Kapasitas jarak antara pesawat yang landing dan take off (headway) Bandara Juanda sudah melampaui batas ideal;3. Mendesaknya kebutuhan pengembangan Bandara Juanda (Sipil/Komersiil) di lokasi lain di Jawa Timur;4. Belum effisiennya angkutan Barang dari dan antar pelabuhan;5. Terhentinya pendalaman dan pelebaran Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS); |

| No | Urusan | Permasalahan |
|-----|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 6. Belum optimalnya Pemanfaatan Kerjasama Barang Milik Daerah di Pelabuhan dan Bandara. 7. Mendesaknya kebutuhan angkutan masal BRT di Kawasan Aglomerasi GKS; |
| 8. | Lingkungan Hidup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. 2. Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam. 3. Menurunnya jumlah dan debit mata air. 4. Masih rendahnya capaian pelayanan dan terbatasnya sarana prasarana persampahan |
| 10. | Kependudukan dan Catatan Sipil | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelaksanaan E-KTP 2. Belum Optimalnya pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai upaya meningkatkan kualitas penduduk |
| 11. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan; 2. Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki; 3. Masih lemahnya kelembangaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan banyaknya peraturan perundangan yang |

| No | Urusan | Permasalahan |
|-----|--|---|
| | | <p>bias gender</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak; 5. Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan; 6. Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang. |
| 12. | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya TFR dari 2,1 (SDKI 2007) menjadi 2,3 (SDKI 2012) 2. Masih tingginya angka kematian bayi 30/1000 kelahiran hidup (SDKI 2012) |
| 13. | Sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS, 2. Tingginya angka penyalagunaan narkoba 3. Meningkatnya jumlah penderita HIV/ AIDS 4. Masih rendahnya manajemen pelayanan korban bencana alam dan bencana sosial 5. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan gangguan jiwa |
| 14. | Ketenagakerjaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana |

| No | Urusan | Permasalahan |
|-----|--|---|
| | | <p>prasarana pelatihan di BLK</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja 3. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi 4. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal |
| 15. | Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro yang informal dan memiliki aset dan akses ke pembiayaan serta produktivitas yang terbatas. (95,72% Usaha Mikro 6.533.694 unit dari 6.825.931 unit sensus UMKM 2012) 2. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan. Kredit UMKM hanya 29,6% total kredit. 3. Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar. (kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas). 4. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud; |

| No | Urusan | Permasalahan |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 5. Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen 6. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru (2 inkubator bisnis); 7. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UMKM (3.856 koperasi tidak aktif); |
| 16. | Penanaman Modal | <ul style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya kesenjangan (lag) investasi antara ijin prinsip dan realisasi investasi, 2. Kurang memadainya kapasitas SDM dan infrastruktur penunjang investasi 3. Kurang kondusifnya iklim & minat investasi |
| 17. | Kebudayaan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat 2. Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah 3. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya |
| 18. | Kepemudaan dan Olah Raga | <ul style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas pemuda 2. Minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya 3. Terbatasnya sarana prasarana olah raga di daerah 4. Masih rendahnya kualitas atlit |
| 19. | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | <ul style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman |

| No | Urusan | Permasalahan |
|-----------|---------------|---|
| | | <p>wawasan kebangsaan</p> <ol style="list-style-type: none">2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam proses politik3. Belum optimalnya pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.4. Masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban5. Aktivitas Ormas/LSM belum semua melaporkan6. Kurang berdayanya institusi-institusi demokrasi, peningkatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM.7. Lemahnya penegakan supremasi hukum, rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat dan kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM8. Kecilnya rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk9. Kecilnya rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk10. Turunnya Rasio Pos Siskamling Per Jumlah |

| No | Urusan | Permasalahan |
|-----|--|--|
| | | <p>Desa/Kelurahan</p> <p>11. Tingginya Angka kriminalitas</p> <p>12. Unjuk rasa masyarakat (demo) yang cenderung meningkat</p> |
| 20. | <p>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian</p> | <p>1. Belum sinkronnya Pengumpulan data agregasi pada LPPD Kab/Kota dengan data SKPD Provinsi Jatim dlm pelaksanaan urusan wajib dan pilihan</p> <p>2. Banyaknya kasus pelanggaran kepegawaian (Disiplin, pidana/gratifikasi/ tipikor) di Kab/Kota yang penjatuhan hukumannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Distribusi dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan</p> <p>4. Banyaknya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik</p> <p>5. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik</p> <p>6. Kurangnya Sarana dan Prasarana Aparatur Negara</p> <p>7. Kurangnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah</p> <p>8. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu</p> <p>9. Rendahnya prosentase Kab/ Kota yang telah menyusun database inventarisasi asset</p> |

| No | Urusan | Permasalahan |
|-----|--------------------------------|--|
| | | <p>hasil P3D secara lengkap dan akurat</p> <p>10. Belum optimalnya implementasikan SPM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah</p> <p>11. Masih banyaknya fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum</p> <p>12. Terbatasnya jumlah personil yang memenuhi kualifikasi jurnalistik, IT dan Protokoler.</p> <p>13. Terbatasnya media yang dapat mempublish informasi melalui press rilis</p> <p>14. Kompleksibilitas pelayanan kunjungan tamu VVIP yang cenderung meningkat.</p> <p>15. Belum berkembangnya budaya IPTEK di masyarakat</p> <p>16. Lemahnya sinergi kebijakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil</p> |
| 21. | Ketahanan Pangan | <p>1. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan beras (88,6 Kg/kapita/tahun),</p> <p>2. Pola konsumsi masyarakat belum berimbang (skor PPH 79).</p> <p>3. Harga bahan pangan masih fluktuatif.</p> <p>4. Keamanan Pangan yang masih memerlukan penanganan serius</p> |
| 22. | Pemberdayaan Masyarakat | <p>1. Belum optimalnya peran kader</p> |

| No | Urusan | Permasalahan |
|-----|-----------------------------------|---|
| | dan Desa | <p>pemberdayaan masyarakat yang telah dilatih dan belum terakreditasinya pelatihan pemberdayaan masyarakat</p> <p>2. Belum terintegrasinya program pemberdayaan masyarakat dengan program pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan</p> <p>3. Belum Optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi</p> |
| 24. | Kearsipan | <p>1. Belum optimalnya penataan tertib arsip;</p> <p>2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan;</p> |
| 25. | Komunikasi dan Informatika | <p>1. Masih Terjadinya Kesenjangan Di Bidang Komunikasi Sosial Dan Teknologi Informasi (Digital Devide) Dimasyarakat Khususnya Antara Desa Dan Kota</p> <p>2. Belum optimalnya penyebar luasan informasi kepada masyarakat</p> <p>3. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan PELayanan Publik</p> <p>4. Masih terbatasnya Sarana dan prasarana Monitoring Isi Siaran di Media Televisi dan Radio.</p> |
| 26. | Perpustakaan | <p>1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan bagi</p> |

| No | Urusan | Permasalahan |
|-----------|-----------------------|---|
| | | <p>pengembangan kualitas bangsa;</p> <p>2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan.</p> |
| | URUSAN PILIHAN | |
| 1. | Pertanian | <p>1. Permasalahan utama adalah Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian (share PDRB/ jumlah tenaga kerja) dan NTP yang diakibatkan oleh produksi dan produktivitas yang belum optimal yang disebabkan oleh beberapa permasalahan pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepemilikan lahan pertanian relatif sempit (0,36 Ha), b. Rendahnya bahan organik tanah, masih terjadinya alih fungsi lahan. , c. Fluktuasi Perubahan iklim yang mengakibatkan gangguan produksi, d. Belum optimalnya infrastruktur pertanian, e. Masih terjadi kehilangan hasil pertanian f. Daya saing produk pertanian relatif masih rendah. g. Masih adanya pemotongan sapi betina produktif. h. Terbatasnya RPH modern yang berstandar SNI, i. Terbatasnya Petugas Lapangan Pertanian, j. Kelembagaan petani yang |

| No | Urusan | Permasalahan |
|----|---------------------------------------|---|
| | | <p>masih berdasarkan alamat (<i>by adres</i>).</p> <p>k. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan</p> <p>l. Belum optimalnya Perlindungan usahatani (asuransi pertanian baru tahap pilot project).</p> <p>m. Masih terjadi mutasi lahan ke non pertanian yang cukup tinggi.</p> <p>n. Masih tingginya harga pakan ternak</p> |
| 2. | Kehutanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan 2. Rendahnya pendapatan masyarakat desa sekitar hutan; 3. Belum berkembangnya hutan rakyat, 4. Tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan; 5. Belum optimalnya penanganan konservasi hutan dan lahan. |
| 3. | Energi dan Sumber Daya Mineral | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan potensi dan pasokan/ suplai energi 2. Masih belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP) 3. Masih adanya kegiatan penambangan liar dan pengambilan air tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan. |
| 4. | Pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sinergi dengan pihak-pihak terkait di Jawa |

| No | Urusan | Permasalahan |
|----|-------------------------------|---|
| | | Timur, menjadikan tumpang tindih dengan instansi yang lain |
| 5. | Kelautan dan Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran; 2. Menurunnya potensi ikan lemuru di perairan selat Bali; 3. Keterbatasan bahan baku perikanan untuk mendukung industri pengolahan hasil perikanan 4. Tingginya tingkat abrasi pantai; 5. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; 6. Mutu dan hasil tangkapan masih rendah; 7. Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System (CCS) belum optimal; 8. Kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah, 9. Harga pakan ikan pabrikan tinggi; 10. Rendahnya kualitas garam rakyat 11. Masih maraknya kegiatan illegal unreported dan unregulated fishing; 12. Kualitas SDM non aparaturnya (nelayan dan pembudidaya ikan) yang masih perlu ditingkatkan. |
| 6. | Perdagangan | 1. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri, |

| No | Urusan | Permasalahan |
|----|-------------------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="794 309 1286 607">2. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G)<li data-bbox="794 618 1286 741">3. Masih terjadi Fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli |
| 7. | Industri | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="794 790 1286 913">1. Masih tingginya tingkat ketergantungan produk dari bahan baku impor<li data-bbox="794 925 1286 1003">2. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan design produk<li data-bbox="794 1014 1286 1093">3. Hambatan peningkatan efisiensi produksi,<li data-bbox="794 1104 1286 1182">4. Efisiensi biaya transaksi relatif masih rendah |
| 8. | Ketransmigrasian | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="794 1193 1286 1272">1. Kurangnya Minat masyarakat untuk bertransmigrasi<li data-bbox="794 1283 1286 1406">2. Kurangnya kesiapan daerah tujuan penempatan transmigran |

4.2 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan uraian dinamika pembangunan yang telah dijelaskan pada Bab-Bab sebelumnya, maka dapat diperinci isu-isu strategis pembangunan Jawa Timur ke depan, sebagai berikut:

4.2.1 Isu Internasional

4.2.1.1. Gejolak Perekonomian Global

Kondisi perekonomian global hingga permulaan Tahun 2014 masih diwarnai dengan ekses gejolak krisis global yang diawali dari Krisis Utang

Yunani yang mengimbas pada Uni Eropa hingga Amerika dan akhirnya berdampak pada seluruh dunia.

Krisis ekonomi global tersebut memunculkan isu strategis internasional yang antara lain meliputi :

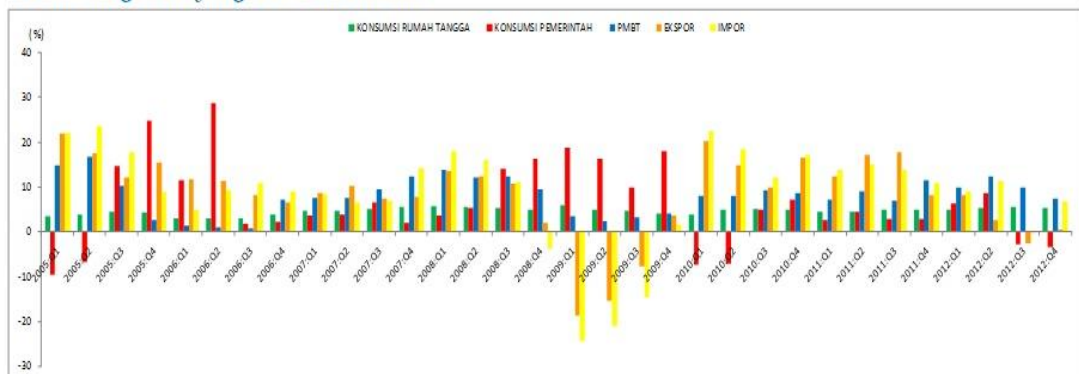
- **Pertama** adalah ketidakpastian mengenai kecepatan pemulihan global. Perkembangan hingga akhir tahun 2013 menunjukkan pemulihan ekonomi global yang tidak sesuai harapan, bahkan melambat. Situasi menjadi tidak pasti karena bergesernya lanskap ekonomi global.
- Isu **kedua**, terkait ketidakpastian yang meluas seiring ketidaktegasan kebijakan di Amerika Serikat, baik terkait penarikan stimulus kebijakan moneter maupun penyelesaian batas anggaran dan penghentian belanja pemerintah. Situasi yang berlarut ini memicu penilaian ulang risiko oleh investor dan menimbulkan reaksi berlebihan, akhirnya menimbulkan gejolak di pasar keuangan global, termasuk RI.
- **Ketiga** adalah berkaitan dengan ketidakpastian perkembangan harga komoditas. Sejalan dengan ekonomi global yang lambat dan pasar keuangan global yang bergejolak, harga komoditas masih melanjutkan tren penurunannya sehingga mempertegas era siklus panjang harga komoditas.

Dalam kondisi perekonomian global yang tidak menentu/tidak pasti, nampaknya Pemerintah Indonesia masih akan mengandalkan konsumsi dalam negeri dan investasi untuk menggenjot pertumbuhannya di tahun 2013 ini karena kontribusi ekspor belum bisa diharapkan akibat permintaan global yang sedang menurun.

Grafik 4.1

Laju Pertumbuhan PDB Indonesia Atas dasar Harga Konstan 2000 Menurut Pengeluaran, Tahun 2005-2012 (YoY, dan dalam %)

Kinerja neraca perdagangan belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena kondisi ekonomi global yang belum membaik



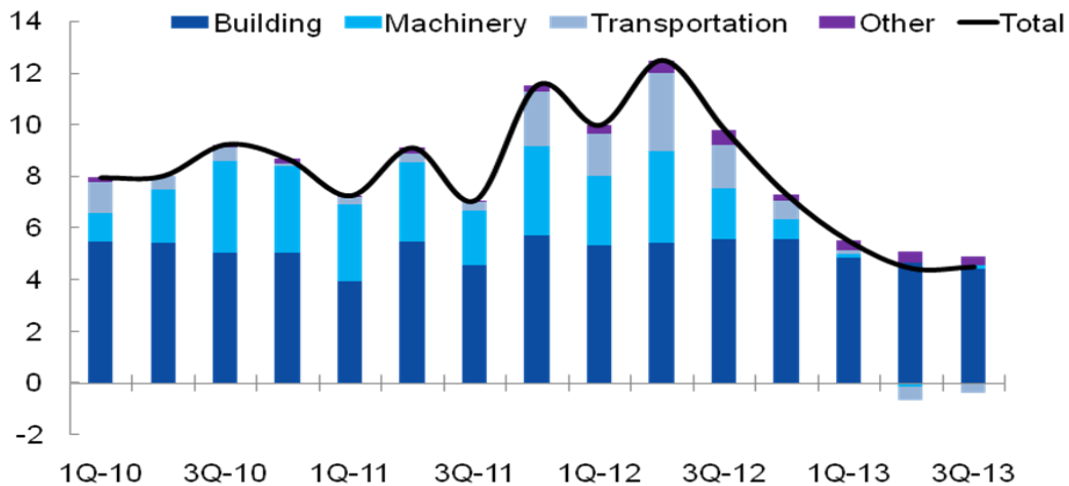
Sumber: BPS dan CEIC

Berkembangnya ketiga isu global tersebut tentu tak terhindar akan menurunkan kinerja ekonomi Nasional Indonesia. Di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik, kuatnya tekanan global mengakibatkan neraca transaksi berjalan juga akan mengalami tekanan. Terkait pengurangan stimulus fiskal (*tapering off quantitative easing*) oleh The Fed juga berpengaruh ke seluruh dunia. Hal ini akan membuat ekonomi nasional ditandai derasnya aliran modal asing yang keluar dan membuat nilai tukar rupiah tertekan tajam, seperti kecenderungan grafik berikut :

Grafik 4.2

Trend Perlambatan Investasi tahun 2010 - Tw. III 2013

Pertumbuhan investasi tetap riil, tahun-ke-tahun, persen



Sumber: Bank Dunia

4.2.1.2. Lingkungan Hidup

Isu Internasional lingkungan hidup adalah perubahan iklim dan pemanasan global sebagai akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), kenaikan temperatur serta terjadi pergeseran musim.

Untuk membatasi peningkatan suhu global perlu dilakukan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan.

4.2.1.3. Millenium Development Goals (MDG's)

Isu global dari lahirnya deklarasi millenium atau *Millenium Development Goal's* (MDG's) yang diungkapkan dalam KTT Millenium di New York bulan September 2000 adalah masih tingginya angka kemiskinan di dunia dimana hampir separuh penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dolar, sekitar 800 juta orang dalam kondisi kelaparan, derajat kesehatan yang masih rendah dimana setiap tahun hampir 11 juta anak meninggal sebelum mencapai usia balita, setiap tahun lebih dari 18 juta orang meninggal akibat hal-hal yang berhubungan dengan kemiskinan, umumnya mereka adalah perempuan dan anak-anak. Adanya kesenjangan akses pada pendidikan antara anak lelaki maupun perempuan, ketidak pedulian manusia akan lingkungan dan solidaritas internasional juga menjadi latar belakang dicituskannya MDG's.

Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu rencana pembangunan pasca MDG's 2015. Agenda pembangunan Pasca-*Millennium Development Goals* (MDGs) 2015 masih menempatkan upaya penurunan kemiskinan sebagai isu utama. Terdapat 3 (tiga) isu utama pada pasca-MDGs 15 tahun setelah tahun 2015, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Disepakati terdapat 12 agenda lanjutan Pasca MDG's 2015 yang harus ditindaklanjuti untuk diselesaikan oleh negara-negara yang berkomitmen terhadap MDG's. Ke-12 butir agenda itu adalah *pertama*, mengakhiri kemiskinan; *kedua*, meningkatkan pemberdayaan wanita dan mencapai kesetaraan gender; *ketiga*, menyediakan pendidikan berkualitas dan suasana belajar seumur hidup; *keempat*, memastikan kesehatan yang layak; *kelima*, ketahanan pangan dan tercukupinya nutrisi; *keenam*, mencapai akses air minum dan sanitasi.

Selanjutnya butir *ketujuh*, yaitu menjaga keberlanjutan ketersediaan energi; *kedelapan*, penciptaan lapangan kerja, mata pencarian keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang adil; *kesembilan*, pengelolaan aset sumber daya alam secara berkesinambungan; *kesepuluh*, memastikan terciptanya tata kelola yang efektif di pemerintahan dan lembaga; *kesebelas*, memastikan terciptanya kehidupan sosial yang stabil dan damai; dan *keduabelas*, menciptakan lingkungan yang berdaya dengan pendanaan jangka panjang.

4.2.1.4. Ancaman Global Terhadap Krisis Pangan

Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat yang diikuti oleh semakin besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian telah berdampak pada semakin terbatasnya ketersediaan pangan dunia, sehingga perlu upaya-upaya yang berkekanjutan untuk memperbaiki struktur produksi pangan yang diikuti dengan menekan laju pertumbuhan penduduk. Situasi produksi pangan di dunia diperkirakan relatif membaik tahun 2014. Total produksi cerealia di dunia akan meningkat 8,4% di periode 2013/2014 dibanding 2012/2013. Peningkatan terjadi 2, 6% di negara berkembang dan 17,4% di negara maju (*FAO Crop Prospects and Food Situation*, Desember 2013). Stok cerealia di dunia pada akhir musim 2014 diperkirakan meningkat 13,4% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, harga cerealia dunia terutama gandum, beras dan jagung akan menurun di tahun 2014. Harga kedelai internasional serta minyak nabati akan menurun juga (*FAO Food Price Index*, 9/1/2014).

4.2.1.5. Energi

Isu internasional energy dan sumberdaya mineral adalah keterbatasan energy dan pengembangan energy baru terbarukan, pertambangan illegal dan pertambangan berkelanjutan.

Minyak merupakan salah satu energi yang masih tetap dipertahankan dan dibutuhkan, namun saat ini dunia dihadapkan pada produksi minyak yang terus menurun dan sebaliknya kebutuhan akan konsumsi minyak terus meningkat sebanding dengan jumlah populasi penduduk. Berangkat dari peningkatan tajam harga minyak dunia yang pernah terjadi waktu lalu, telah memunculkan adanya isu keamanan energi kini telah menjadi salah satu isu terhangat dalam agenda keamanan global dan hubungan internasional.

Salah satu upaya untuk mengatasi isu dimaksud tahun 2012 ditetapkan sebagai tahun energi terbarukan internasional oleh PBB dalam rangka meraih tiga target besar yaitu: menjamin akses yang setara atas energi modern, melipatgandakan efisiensi energi dan melipatgandakan kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi global sebelum 2030. Di level regional (APEC) juga mengagendakan isu energi dan ketahanan pangan disamping isu-isu perekonomian.

4.2.1.6. Air

Isu internasional terkait dengan Air diantaranya adalah:

- a) Pencapaian target MDG's 2015 untuk sektor Air Minum dan Sanitasi di perkotaan dan pedesaan.
- b) Sesuai dengan tujuan pembangunan millenium (MDG's) bahwa Program Pengelolaan Sumber Daya Air harus mendukung untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem serta untuk memastikan kelestarian lingkungan

4.2.1.7. Transportasi

- a) Perlunya konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat perdagangan dan industri
- b) Perlunya penyediaan infrastruktur darat, laut dan udara untuk mengurangi kesenjangan wilayah
- c) Terwujudnya pelayanan transportasi antar moda yang terus menerus (single seamless)
- d) Percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan
- e) Terpenuhinya standard keamanan dan keselamatan penerbangan ICAO (Internasional Civil Aviation Organization)

4.2.2 Isu Regional

4.2.2.1 Daya Saing Nasional dalam AEC

Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling ketergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara.

Tabel 4.1
Lingkup AEC 2015

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) | Pasar Tunggal dan Basis Produksi | Aliran bebas barang | Butuh |
| | | Aliran bebas jasa | |
| | | Aliran bebas investasi | |
| | | Aliran bebas modal | |
| | | Aliran bebas tenaga kerja terlatih | |
| | Kawasan ekonomi yang kompetitif | Kebijakan kompetisi | Kesiapan DAYA SAING REGIONAL |
| | | Proteksi konsumen | |
| | | Hak kekayaan intelektual (HAKI) | |
| | | Pembangunan infrastruktur | |
| | | Perpajakan | |
| | | <i>E-Commerce</i> | |
| | Pembangunan ekonomi yang merata | Pembangunan UMKM | |
| | | <i>Initiative for ASEAN Integration (IAI)</i> "Mengurangi <i>gap</i> pembangunan internal ASEAN" | |
| | Integrasi dg Perekonomian Global | Pendekatan koheren dalam hubungan ekonomi eksternal "Negosiasi FTA dan CEP dengan pihak non-ASEAN" | |
| | | Meningkatkan partisipasi dalam <i>global supply network</i> | |

Di era perekonomian Global yang makin kompetitif, membutuhkan kerjasama antar negara dalam bentuk regionalisasi seperti AEC tersebut. Sejumlah ciri yang menandai dan perlu diantisipasi adalah adanya liberalisasi, ekspansi pasar dan kecenderungan (preference) perilaku konsumtif di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi yang menumbuhkan regionalisasi seperti AEC bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga melahirkan perubahan struktur sosial masyarakat dan mempengaruhi dinamika kondisi perekonomian di berbagai level dari tingkat Internasional hingga lokal.

Di Indonesia, dan di Provinsi Jawa Timur pada khususnya, Regionalisasi semacam AEC adalah realitas yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang – barang impor. Selain itu, perdagangan bebas juga memunculkan non-tarif barriers seperti standarisasi produk melalui ISO, Eco Labelling, HACCP dan lain-lain, yang dapat mengganggu kinerja perdagangan luar negeri kita.

4.2.2.2 Transportasi

- Perlunya sinkronisasi sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah dalam tatanan pelayanan transportasi
- Peningkatan keterjangkauan pelayanan transportasi perintis untuk mendukung pengembangan wilayah
- Tercapainya pelayanan yang berkesinambungan dan tepat waktu sesuai dengan standard yang diberlakukan
- Peningkatan kinerja dan efisiensi pelabuhan khususnya untuk layanan angkutan barang
- Peningkatan keselamatan penerbangan baik selama penerbangan maupun di bandara

4.2.3 Isu Nasional

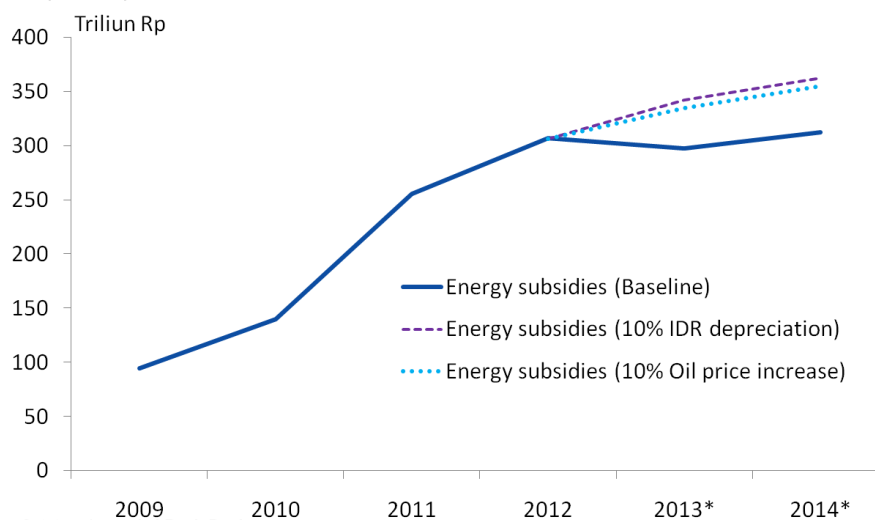
4.2.3.1 Semakin Besarnya Subsidi dan Instabilitas Harga Komoditi

Tiga Isu strategis yang mewarnai perekonomian nasional Indonesia terakhir ini antara lain :

- pertama terkait beban subsidi yang mempengaruhi ketahanan fiskal pemerintah. Jumlah subsidi akan terus membesar jika tidak ada upaya untuk menguranginya. Beban subsidi ini akan berdampak negatif terhadap ekonomi ke depan.

Grafik 4.3
Tingkat Subsidi Energi Tahun 2009-2014

Biaya subsidi energi – dasar (*baseline*) dan dengan depresiasi Rupiah/peningkatan harga minyak 10 persen



Catatan: *proyeksi Bank Dunia
Sumber: perhitungan staf Bank Dunia

- Isu kedua adalah terkait dengan harga beberapa komoditas pangan seperti daging dan bawang putih yang harganya meroket saat ini. kompleksitas pasar harus disikapi dengan kebijakan yang tepat guna mewujudkan stabilitas harga.
- Kontraksi perekonomian global yang berakibat pada defisit neraca transaksi berjalan (*current account*).
- Kontraksi terhadap Nilai Tukar Rupiah terhadap dollar AS yang mengakibatkan kemungkinan berbagai dampak diantaranya cadangan devisa.

4.2.3.2 Situasi Pangan Nasional

Situasi pangan di Indonesia pada 2014 tidak lebih baik dibandingkan 2013. Hal ini ditandai dengan meningkatnya impor lima komoditas pangan utama. Hal ini disebabkan sistem pangan nasional terintegrasi dengan sistem pangan global yang menyebabkan Indonesia masuk dalam “jebakan impor pangan”. Pembelajaran selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan hal tersebut. Hanya dalam tempo yang relatif singkat terjadi peningkatan impor serelia yang luar biasa. Impor serelia meningkat 60,45% hanya dalam kurun waktu empat tahun (nilai rata-rata impor serelia periode 2011-2013 dibandingkan dengan periode 2007-2009).

Di tahun 2014 diperkirakan impor beras akan kembali naik di atas 1,5 juta ton, kedelai di atas 1,6 juta ton, dan jagung mendekati 3 juta ton. Impor gandum juga akan meningkat menjadi sekitar 6,5 juta ton, sedangkan impor gula relatif stabil di angka sekitar 3 juta ton. Hal tersebut sebagian disebabkan harga yang cenderung menurun di pasar global yang akan berdampak pada kemungkinan-kemungkinan terjadinya distorsi impor pangan karena memanfaatkan kecenderungan penurunan harga pangan di pasar global (Kompas, 21 Januari 2014).

4.2.3.3 Implementasi Undang-undang Desa dalam lingkup Kewenangan Provinsi

Dalam rangka memfasilitasi implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Jawa Timur, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai peran yang sangat strategis untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa, meningkatkan

kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, menetapkan bantuan keuangan kepada Desa dan melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan di Jawa Timur.

Jumlah Desa di Jawa Timur sebanyak 7.722 Desa, Kelurahan 783 dan Kecamatan 664 merupakan wilayah yang sangat luas, sehingga memerlukan adanya koordinasi yang baik dan berkelanjutan disemua program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporannya, hal ini mengharuskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyiapkan strategi yang efektif dan modern dalam mengkoordinasikannya.

Undang-Undang Desa yang baru disahkan mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat agar mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang besarnya 10 persen dari dana transfer yang diterima Daerah dari Pemerintah Pusat (On Top), dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan dan tingkat kemiskinan. Diperkirakan setiap Desa akan menerima dana berkisar 750 juta rupiah sampai dengan 1,4 Milyar rupiah pertahunnya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan kondisi eksisting kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa di Jawa Timur masih belum terbiasa atau mempunyai pengalaman mengelola keuangan negara yang jumlahnya demikian besar, maka perlu adanya langkah-langkah yang strategis dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi agar Aparatur Pemerintahan Desa mampu mengelola keuangan dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku melalui kegiatan pemberdayaan baik dalam bentuk Diklat maupun Bimtek.

Disamping itu dalam rangka menciptakan tertib administrasi negara dan dimana Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan kewilayahan berserta permasalahannya, maka perlu mengefektifkan peran Pemerintah Desa dalam pencatatan administrasi kependudukan, kewilayahan, kekayaan/potensi desa dan permasalahannya yang terintegrasi dengan Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi serta Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai data dan informasi yang akurat dan terpadu yang dapat memudahkan dalam mengelola potensi dan permasalahan yang terjadi dimasyarakat dengan cepat dan cermat.

4.2.3.4 Infrastruktur

Isu strategis infrastruktur diantaranya adalah:

1. Percepatan penurunan angka Backlog perumahan melalui pembangunan Rusun Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penyediaan PSU Perumahan.
2. Mendukung program Pemerintah dalam mempertahankan surplus sepuluh juta ton beras, Jawa Timur mendapat beban penyediaan surplus beras lima juta ton dari target nasional. Sehingga masih diperlukan tambahan areal tanam baru seluas 345.770 dan tampungan air baku melalui pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air berupa pembangunan waduk dan embung.
3. Peningkatan daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana lalu-lintas angkutan jalan;
4. Peningkatan armada perintis untuk melayani wilayah yang sedang dan belum berkembang
5. Peningkatan keterpaduan jaringan prasarana darat, laut dan udara
6. Masih minimnya kapasitas pelabuhan dan pengembangan interkoneksi dengan hinterlan dan hub internasional
7. Peningkatan sarana dan prasarana Bandara serta angkutan udara perintis
8. Peningkatan kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara di Bandara maupun Pelabuhan

4.2.3.5 Penerapan SPM

Target pencapaian SPM tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014, yang merupakan salah satu bagian dari prioritas pertama dari 11 prioritas nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola. Prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola menginginkan terjadinya pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Hal itu kemudian didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik.

Kebijakan terkait dengan pelaksanaan SPM di daerah tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 32/2004 tentang pemerintah. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kemudian Pasal 11 ayat (3) menyebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Luasnya cakupan pelayanan dasar, sebagaimana urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah. Sehingga perlu adanya pengaturan standar pelayanan, paling tidak dalam kategori minimal dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan jasa, pelayanan barang dan/atau pelayanan usaha yang diberikan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SPM merupakan tolok ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan layanan publik lainnya.

Terkait dengan pelaksanaan SPM di daerah pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah nomer 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memuat ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Di dalam peraturan tersebut memberikan pemahaman tentang SPM secara memadai dan merupakan hal yang signifikan berkaitan dengan hak-hak konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat yang harus mereka peroleh dan wajib dipenuhi oleh pemerintah, berupa tersedianya pelayanan publik (pelayanan dasar) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Di jajaran birokrasi pemerintah sendiri pengertian SPM masih sering dikacaukan dengan standar persyaratan teknis, standar kerja dan standar pelayanan prima.

Untuk mempercepat penerapan SPM di daerah, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 79 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal yang mengatur penerapan standar pelayanan minimal di daerah melalui 4 tahapan, yaitu: Persiapan rencana pencapaian SPM, Pengintegrasian rencana SPM dalam dokumen perencanaan, Mempersiapkan mekanisme pembelanjaan penerapan SPM dan perencanaan pembiayaan SPM serta Penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM.

Permasalahan SPM di Jatim:

Penerapan SPM di Provinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur, belum semua dituangkan dalam bentuk aturan (Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah / Instruksi) kebanyakan masih dalam bentuk surat Kepala Daerah tentang pelaksanaan dan pelaporan SPM di Daerah. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, memang tidak dinyatakan bahwa penetapan dan pelaksanaan SPM harus ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Untuk SPM Provinsi secara prinsip telah masuk dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 sebagaimana termuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009, tetapi tidak secara eksplisit memuat masing-masing indikator sebagaimana SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah / Kementerian yang bersangkutan. SPM Provinsi secara koordinatif telah dilakukan pembahasan dalam rapat koordinasi yang memuat 9 bidang tetapi dalam perkembangannya 1 (satu) bidang SPM telah ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penerapan dan Rencana Program Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, sedangkan 8 bidang lainnya masih dalam proses.

4.2.3.6 Gender

Integrasi Pengarusutamaan Gender kedalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di Tingkat Pusat maupun Daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki maupun anak perempuan. Terkait dengan hal tersebut, Isu strategis gender yang perlu memperoleh perhatian adalah :

1. Pelaksanaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender belum optimal;
2. Masih banyaknya SKPD yang belum membentuk focal point;
3. Masih kurang lengkapnya penyusunan data terpilah di masing-masing SKPD;
4. Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsif Gender kedalam Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

Isu Strategis Gender ini nantinya akan berdampak pada peningkatan kapasitas SDM penggerak PPRG di daerah. Dengan meningkatnya kapasitas SDM penggerak PPRG daerah diharapkan dapat mengawal pelaksanaan PPRG di masing-masing SKPD sehingga program dan kegiatan yang dilakukan SKPD benar-benar dapat mengintegrasikan isu kesenjangan gender sehingga dapat menjawab permasalahan pembangunan dimasing-masing sektor.

4.2.3.7 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dinamika pembangunan yang terjadi saat ini akan berdampak pada alih fungsi lahan produktif pertanian, khususnya di lokasi lahan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sehingga perlu upaya-upaya pengendalian untuk menjaga konsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mendukung perwujudan pencapaian target ketahanan pangan nasional.

4.2.3.8 Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai matra spasial pembangunan belum diacu dalam implementasinya oleh berbagai sektor sehingga berdampak pada pengembangan wilayah yang tidak terkendali. Hal ini ditandai dengan meningkatnya dinamika alih fungsi lahan produktif, sehingga perlu adanya pengawalan terhadap pemanfaatan ruang serta perumusan instrument pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

4.2.3.9 Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup secara nasional meliputi perusakan/kebakaran hutan, banjir/longsor, kemarau panjang, perburuan/perdagangan hewan dilindungi; penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industry, polusi udara, limbah B3, pembuangan sampah tanpa pengolahan, serta Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

RAN GRK merupakan komitmen Indonesia dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat dukungan internasional pada tahun 2020.

4.2.3.10 Energi

Isu energy dan sumber daya mineral nasional adalah ketahanan energy, diversifikasi energy, konservasi energy, dukungan terhadap MP3EI, subsidi energy, energy untuk daerah perbatasan dan tertinggal, pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan, peningkatan nilai tambah mineral, dan isu terkait lingkungan hidup. Adapun rasio elektrifikasi nasional tahun 2012 adalah

sebesar 76,56%, yang berarti bahwa masih terdapat sekitar 23,44% belum terpenuhi.

4.2.4 Isu Wilayah Perbatasan

4.2.4.1 Sinergitas Kebijakan antar Wilayah

Perbedaan karakteristik dan potensi wilayah diantara dua wilayah yang saling berbataasan, hingga saat ini masih berpotensi memicu gejolak antar masyarakat. Di sisi lain perbedaan dalam aturan dan penerapannya juga memungkinkan munculnya permasalahan yang memungkinkan terjadinya gejolak antar wilayah. Isu strategis dari permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antar Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur antara lain :

- **Disharmoni aturan**, kebijakan serta penerapannya;
Fenomena ini muncul seperti adanya perbedaan penerapan aturan pada sektor Pendidikan (misalnya perbedaan aturan Sekolah di dua wilayah perbatasan), Kesehatan (misalnya dalam kebersamaan Pemberantasan Wabah Penyakit), Sosial (misalnya dalam kebersamaan penanganan PMKS), Perikanan & Kelautan (misalnya kesamaan dalam penerapan aturan pemakaian Jaring di Laut)
- **Kesenjangan Sosial/ekonomi**;
Kesenjangan karakteristik Sosial Ekonomi kemasyarakatan seperti pada dua wilayah yang berbeda akan semakin memperlebar disparitas antar wilayah.
- **Disorientasi Prioritas Pembangunan**;
Perbedaan orirntasi pembangunan yang akan diprioritaskan berpotensi memunculkan masalah di wilayah perbatasan seperti perbedaaan waktu penanganan Infrastruktur jalan yang saling berhubungan pada dua wilayah yang saling berbataasan.
- **Eksplorasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam**
Kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam perlu dipertimbangkan dampaknya pada wilayah lain di luar wilayah administrasinya sendiri. Fenomena pemakaian Air Bersih dari Provinsi lain dengan perlunya juga mempertimbangkan konservasi hutan serta daya dukung lingkungan.

4.2.4.2 Penetapan Batas Wilayah

Penetapan batas wilayah juga merupakan permasalahan yang membutuhkan solusi yang menyeluruh agar tidak terjadi gejolak di masyarakat.

4.2.5 Isu berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

4.2.5.1 Isu Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Penyusunan substansi dasar pembangunan jangka menengah daerah tentunya tidak lepas dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Sejauhmana hasil-hasil pembangunan jangka menengah 5 tahun sebelumnya mampu memberikan kontribusi yang positif dan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk memacu serta mendorong peningkatan, pengembangan dan percepatan pembangunan daerah 5 tahun kedepan dengan tetap melihat isu permasalahan/strategis yang berkembang.

Dari hasil evaluasi perodesasi RPJPD melalui tahapan pelaksanaan jangka menengah 5 tahunan, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **RPJMD Tahap I (Tahun 2005-2009)**

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan dua tahap sebelumnya, pembangunan pada tahap I diarahkan untuk menata dan membangun Jawa Timur dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Arah kebijakan umum pembangunan daerah ini memberikan makna bahwa jangka waktu 5 tahun pembangunan daerah lebih difokuskan pada peningkatan dan pengembangan agribisnis yang dimulai dari langkah persiapan yaitu (1) menyiapkan regulasi untuk penguatan sistem agribisnis, (2) membangun kelembagaan pasar agribisnis, (3) menyiapkan SDM petani penyuplai produk, (4) membangun jaringan distribusi dan pasar, (5) meningkatkan kualitas produksi, dll.

Langkah-langkah awal sebagai upaya membangun dan mengembangkan system agribisnis di Jawa Timur telah direalisasikan selama 5 tahun berjalan yaitu dengan membangun Pasar Induk Agribisnis (PIA) di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Dengan terbentuknya sistem agribisnis diharapkan Jawa Timur memiliki pondasi kuat untuk menyiapkan langkah tindak lanjut pengembangan agribisnis melalui kebijakan, rencana dan program 5 tahun berikutnya.

- **RPJMD Tahap II (2009-2014)**

Pembangunan daerah tahap kedua diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan produktivitas dan distribusi produk, seiring dengan

peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan IPTEK serta penguatan daya saing perekonomian.

Pada tahapan 5 tahun kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengupayakan peningkatan produktivitas dan distribusi produk seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya petani agribisnis dengan didukung teknologi sehingga memperkuat daya saing perekonomian khususnya dalam rangka menghadapi persaingan pasar perdagangan bebas di Asia Tenggara.

Fokus arah kebijakan ini tercermin dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengembangkan dan meningkatkan fungsi Balai Latihan Kerja di daerah-daerah, maupun melalui bimbingan teknis kepada para kelompok petani di perdesaan khususnya yang memiliki potensi pengembangan agribisnis yang berdaya saing tinggi.

Selain itu, upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia di daerah telah dilakukan dengan memberikan matrikulasi pelatihan/bimbingan yang berupa pemanfaatan teknologi tepat guna serta manajemen bisnis seperti teknik dan strategi petani dalam menghadapi dan mengantisipasi persaingan kuat produksi dan pasar agribisnis yang harus dihadapi. Disisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memberikan insentif-insentif maupun fasilitasi dan sarana prasarana pendukung yang diperlukan agar para petani semakin mantap dalam meningkatkan produk agribisnis yang berbasis teknologi.

Arah kebijakan ini nampak dengan dukungan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada para petani agribisnis baik berupa bantuan dalam berbagai jenis peralatan teknologi pertanian maupun pupuk yang tercermin dari alokasi dana yang ada pada institusi terkait, sehingga diharapkan peningkatan sumber daya manusia yang didukung dengan teknologi berjalan secara simultan.

Sebagai wujud pelaksanaan arah kebijakan tahapan kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan berbagai event pameran di beberapa daerah di Jawa Timur maupun tingkat Nasional termasuk mengikuti agenda kegiatan pameran di luar negeri yang dilakukan melalui kerjasama antar Negara. Perwujudan pelaksanaan dapat ditinjau pula dari transaksi ekspor produk agribisnis Jawa Timur menuju negara-negara lain .

- **RPJMD Tahap III (2014-2019)**

Dengan mempertimbangkan hasil yang sudah dicapai pada tahapan tahun I dan II, pada tahapan tahun ketiga (2014-2019) mendatang Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan arah kebijakan ditujukan lebih

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta didukung dengan kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Kebijakan ini mendeskripsikan bahwa untuk lebih memantapkan kapasitas kelembagaan yang sudah dibangun, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam jangka 5 tahun mendatang perlu memperhatikan kapasitas sumber produksi agribisnis dan jaringan arus distribusi pasar.

Dengan memberdayakan kemampuan dan teknologi petani yang sudah dimiliki diharapkan petani agribisnis mampu berinovasi dalam mengolah dan mengembangkan sumber daya alam menjadi bahan produk jadi yang berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi, sehingga semua subyek pelaku ekonomi agribisnis dapat membawa (ekspor) ke pasar transaksi agribisnis di dalam negeri khususnya pasar persaingan produk agribisnis dari Negara-negara di Asia Tenggara.

Upaya ini perlu dilakukan dengan harapan pada tahapan tahun keempat mendatang memasuki era perdagangan bebas (AFTA) di Asia Tenggara tahun 2015 yang akan datang, produk agribisnis Jawa Timur benar-benar siap, memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu bersaing dengan produk Negara Asia Tenggara.

4.2.5.2 Isu Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah

- **Dinamika pembangunan yang memberi pengaruh terhadap alih fungsi lahan perkotaan**

Dinamika pembangunan pada kawasan perkotaan yang memberikan pengaruh terhadap alih fungsi lahan perkotaan sehingga diperlukan suatu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam kawasan perkotaan

- **Keterbatasan infrastruktur wilayah**

Pemerataan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan perkotaan dan antar kawasan, peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Jawa Timur

- **Peningkatan alih fungsi lahan pertanian di daerah**

Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dalam rangka mempertahankan luasan sawah irigasi dan non irigasi berupa

penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tidak terjadi alih fungsi pada lahan pertanian.

- **Potensi bencana di Jawa Timur yang memberikan ancaman terkait pertumbuhan dan investasi wilayah**

Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari adanya potensi kebencanaan yang dapat memberikan ancaman terhadap wilayah yang direncanakan sebagai pusat pertumbuhan dan investasi, sehingga perlu upaya mitigasi bencana kedalam perencanaan tata ruang

- **Belum optimalnya peran kawasan strategis provinsi**

Pemantapan peran dan fungsi Kawasan Strategis sebagai pusat pertumbuhan wilayah untuk mendorong pengembangan kawasan dalam rangka pemerataan wilayah. Untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru dan pemerataan wilayah diperlukan pengembangan kawasan-kawasan diantaranya:

- a. Cluster Agropolitan Madura yang terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.
- b. Cluster Agropolitan Ijen yang terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi.
- c. Cluster Agropolitan Bromo Tengger Semeru yang terdiri dari Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.
- d. Cluster Agropolitan Wilis yang terdiri dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan.
- e. Cluster Metropolitan yang terdiri dari Kota Surabaya, Kota Batu, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto.
- f. Cluster Segitiga Emas yang terdiri dari Kawasan Strategis Segitiga Emas Pertumbuhan Tuban, Lamongan dan Bojonegoro; Kawasan Strategis Agroindustri Gresik dan Lamongan; dan kawasan perbatasan antar-kabupaten/kota yang memiliki potensi pertumbuhan perekonomian sektoral yang tinggi pada Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bojonegoro.
- g. Cluster Regional Kelud berfungsi sebagai pemerataan aktifitas pusat pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur yang ditetapkan pada Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar.

h. Cluster Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berfungsi sebagai pemerataan dan sebagai upaya untuk membuka akses pada wilayah pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil yang masih belum terlayani di Provinsi Jawa Timur. Cluster pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada kawasan sepanjang pesisir Jawa Timur dan Pulau-Pulau Kecil.

- **Belum terpadunya kegiatan antara kawasan perkotaan dan perdesaan**

Diperlukan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan dimana pembangunan kawasan perkotaan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sector lainnya.

4.2.5.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu Strategis KLHS terkait dengan pengelolaan hutan, lahan dan sumber air, permasalahan pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan, permasalahan efek gas rumah kaca, masih adanya lahan kritis baik di dalam dan di luar kawasan hutan Jawa Timur, masih adanya gangguan kawasan hutan yang menyebabkan degradasi dan deforestasi kawasan hutan Jawa Timur, belum optimalnya informasi geologi dalam rangka mitigasi bencana geologi, konservasi air tanah, pengembangan dan pemanfaatan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air, terjadinya kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan PETI, efisiensi penggunaan energi listrik belum optimal, potensi energi terbarukan cukup besar pengembangan energi panas bumi masih mengalami beberapa kendala, lokasi sebagian berada di kawasan hutan, percepatan peningkatan produksi Gas Bumi untuk pasokan gas di kawasan industri Jawa Timur, terjadi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, meningkatnya intensitas usaha tani di daerah hulu aliran sungai yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, perubahan teknologi dan jumlah penduduk menyebabkan tekanan tersendiri terhadap keseimbangan alam dan iklim pergeseran kondisi alam dan terjadinya berbagai bencana alam untuk menemukan keseimbangan baru, peningkatan kesadaran masyarakat akan kaitan aspek kelestarian lingkungan

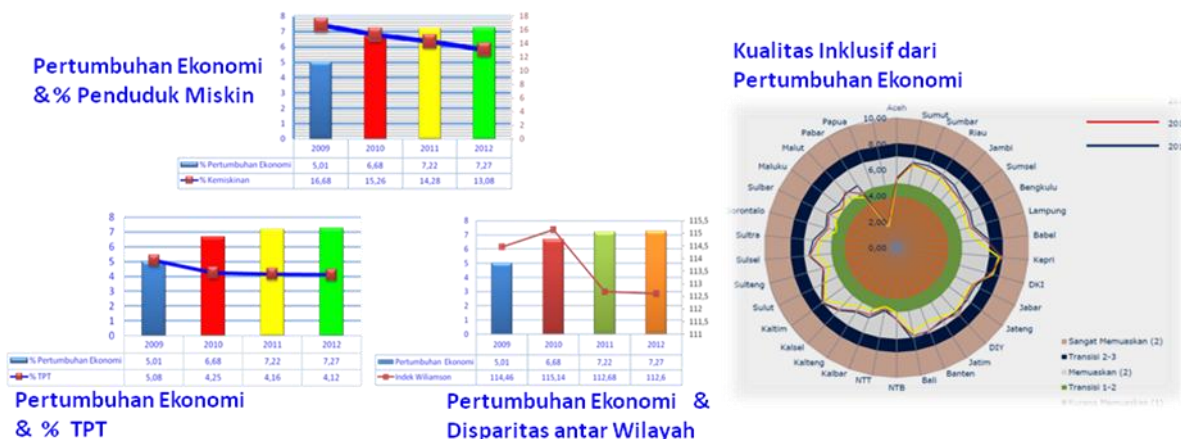
dalam pengambilan keputusan ekonomi, adanya overcapacity sebagian besar prasarana dan sarana perhubungan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam tata niaga ekspor impor khususnya ekspor, negara tujuan memberlakukan green industri, green economy dan eco-labelling, daya saing efisiensi penggunaan bahan baku utama dan penolong serta penggunaan energi melalui konsep produksi bersih meningkatkan daya saing industri dalam negeri, fasilitasi dan pendampingan untuk menuju tercapainya green industry dan green productivity (ramah lingkungan) bagi industri

4.2.6 Isu Strategis Jawa Timur

4.2.6.1 Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009 - 2012) menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM. Berdasar beberapa indikator tersebut kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan" seperti terlihat pada grafik berikut :

Grafik 4.4
Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur



Kualitas pertumbuhan yang terkategori memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dibutuhkan kinerja yang lebih sinergis terutama pada peningkatan daya beli masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4.2.6.2 Peningkatan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM

Keberadaan UMKM di Jawa Timur memiliki nilai penting dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, karena selain sebagai katup pengaman sekaligus juga sebagai penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. Hal ini direpresentasikan dengan kontribusi nilai tambah UKM Jawa Timur ADHB terhadap total PDRB menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu pada tahun 2009-2012 meningkat dari 53,49% (2009) menjadi 54,39% (2012). Disisi lain perkembangan Koperasi di Jawa Timur tahun 2012 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2009, total koperasi menjadi 29.159 unit atau meningkat 50,54% jika dibandingkan dengan 2009 sebesar 19.369 unit.

Isu strategis yang mengemuka pada urusan Koperasi dan UMKM dalam 5 tahun kedepan adalah peningkatan skala usaha UMKM yang meliputi (a) Peningkatan produktivitas UMKM terkait dengan kualitas SDM, akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya); (b) Peningkatan inovasi dan standarisasi; (c) penguatan kelembagaan usaha UMKM (kemitraan) dan (d) perluasan pemasaran. Sedangkan terkait dengan pemberdayaan koperasi, peningkatan tata kelola usaha koperasi menjadi isu yang strategis yaitu peningkatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi dan penataan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi.

4.2.6.3 Disparitas Wilayah

Adanya disparitas wilayah yang Antara lain dapat dilihat dari PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu antara Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo), dan Kota Malang dengan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai PDRB perkapita kecil ada di Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek, Ponorogo), Tapal Kuda (Bondowoso, Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).

4.2.6.4 Infrastruktur

Isu strategis terkait infrastruktur terdiri dari:

1. Perlunya peningkatan kinerja pelayanan dan kapasitas jaringan jalan tol dalam kota untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi;
2. Revitalisasi jaringan kereta api dalam satu jaringan transportasi massal yang terintegrasi dengan jaringan kereta api Surabaya
3. Perlunya percepatan pengembangan pelabuhan sebagai dampak overcapacity pada pelabuhan Tanjung Perak
4. Percepatan pembangunan bandara perintis sebagai akses membuka wilayah yang belum berkembang;
5. Peningkatan kinerja pelayanan dan kapasitas bandara pengumpul skala pelayanan primer;
6. Pertambahan panjang jalan Nasional (Tol dan Non Tol), Jalan Provinsi maupun Jalan Kabupaten/Kota.
7. Dibutuhkan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas di Jawa Timur untuk mengundang investasi internasional melalui pelabuhan.
8. Percepatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur;
9. Peningkatan dan pembangunan jalan Raya Gresik untuk mendukung aksesibilitas kegiatan kepelabuhanan Teluk Lamong yang merupakan pengembangan kapasitas dari Pelabuhan Tanjung Perak.
10. Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah seperti Pembangunan fasilitas sisi darat (Pergudangan) pada Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo dan Bandara Abd Saleh dan pada rencana kawasan pengembangan SURAMADU oleh BPWS.
11. Percepatan Pembangunan Jalan Tembus Lawang-Batu.
12. Guna mereduksi bencana banjir dan kekeringan masih diperlukan gagasan realistis dan strategis antara lain dengan pengalihan sebagian debit banjir dengan cara sudetan dan pembangunan waduk lapangan dengan lapisan Geomembran.
13. Selain infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian dan percepatan, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman.
14. Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan air minum dan persampahan secara regional melalui penyediaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota.

15. Dalam pengelolaan sumber daya air di Jawa Timur terdapat permasalahan-permasalahan antara lain, lahan kritis pada daerah aliran sungai, terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air, bencana banjir dan kekeringan yang terjadi setiap tahun, kurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air.

4.2.6.5 Pengangguran

Isu strategis terkait pengangguran di Jawa Timur masih menyimpan masalah ketenagakerjaan yang cukup serius, diantaranya yakni: upah pekerja yang masih rendah, jaminan/perlindungan sosial tenaga kerja, dan skil/keahlian tenaga kerja yang masih minim.

Selain masalah di atas, pengangguran juga memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang modern dan maju serta meningkatkan kemandirian. Untuk itu, kebijakan pengembangan industri akan dititikberatkan pada:

- industri yang bertumpu pada sumberdaya alam dalam negeri agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih karena dampak gandanya juga akan terlihat dari pembangunan ekonomi nasional.
- industri yang padat karya, karena kita tahu sendiri bahwa bangsa kita memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan pertumbuhan penduduk yang juga tinggi dan dapat dimobilisasi dengan berbagai program untuk meningkatkan kualitas.
- industri yang padat teknologi sebagai landasan bangsa untuk memasuki era perkembangan teknologi maju serta andalan masa depan dalam penguasaan teknologi yang lebih maju.

Selain itu, sekitar 42,5 persen dari seluruh tenaga kerja Jawa Timur terserap di sektor pertanian, namun sektor ini memiliki produktivitas paling rendah dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Untuk mengurangi kemiskinan di Jawa Timur, pemerintah provinsi butuh strategi untuk menarik pekerja ke sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Strategi juga

dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta mempromosikan usaha non-tani seperti industri pedesaan skala kecil

4.2.6.6 Energi

Ratio ketersediaan listrik Jawa Timur sebesar 70,53 persen. Selebihnya sebesar 29 persen adalah ketersediaan listrik yang sudah dan dalam proses diusahakan sendiri (captive power) untuk berbagai kepentingan baik swasta maupun masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan gaya hidup, maka kebutuhan energy juga akan meningkat.

Kontribusi pertambangan sebesar 2,08 persen terhadap total PDRB Jawa Timur. Eksploitasi sumber daya mineral tersebut belum semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti tanpa ijin atau belum sesuai dengan ketentuan teknik/tata cara penambangan yang tepat yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Sampai dengan Tahun 2012, pertambangan tanpa ijin di Jawa Timur seluas 1.438,08 hektar tersebar di 20 Kabupaten, dengan upaya penertiban per tahun berkisar 213,23 hektar.

4.2.6.7 Lingkungan Hidup

Sehubungan dengan pelaksanaan RAN-GRK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), sebagai salah satu upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pada periode sebelumnya, pelaksanaan aksi adaptasi dan perubahan iklim di Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan amanah Pergub dimaksud, direncanakan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan dilaksanakan secara terpadu dan lebih intensif, dalam rangka menurunkan emisi GRK di Jawa Timur, yakni melalui 6 (enam) sector utama yaitu kehutanan, pertanian, energy, transportasi, perindustrian dan pengelolaan limbah. Hasil perhitungan emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2010 adalah 77 juta ton eq CO₂. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, proyeksi emisi GRK Jawa Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar 121 juta ton CO₂ eq. Berdasarkan upaya adaptasi dan mitigasi sebagaimana dimuat dalam RAD GRK Jawa Timur, maka diperkirakan akan dapat menurunkan emisi GRK Jawa Timur sebesar 28,9% atau menjadi sebesar 108 juta ton CO₂ eq.

Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, di dalam dan luar kawasan hutan serta kawasan pesisir dan laut, disebabkan aktivitas manusia dan dampak perubahan iklim. Dampak yang dirasakan adalah hilang atau tidak berfungsinya sumber mata air, kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di musim hujan. Sumber mata air DAS Brantas seluruhnya semula berjumlah 1.577 sumber mata air. Berdasarkan hasil identifikasi di Malang Raya dan Kota Batu, dari 703 sumber mata air, yang berfungsi 344 sumber mata air. Adapun yang memiliki debit 5 liter/detik hanya 13 sumber mata air saja (diolah dari berbagai sumber, Tahun 2012). Selanjutnya kualitas air sungai dimaksud, telah mengalami pencemaran dari limbah domestic dan limbah industry. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai Brantas, telah tercapai penurunan beban pencemaran sesuai target RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014. Namun kualitas air dimaksud belum memenuhi Baku Mutu Lingkungan (BML) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

4.2.6.8 IPM

Kondisi IPM di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan yang sekiranya perlu diperhatikan agar IPM mengalami peningkatan yang lebih baik. Sebagai contoh, pada komponen angka harapan hidup, ini masih perlu ditingkatkan mengingat kondisi kesehatan di masyarakat masih cukup rendah. Dari data BPS dapat dilihat bahwa masih sekitar setengah dari jumlah penduduk yang menggunakan tempat pembuangan tinja dengan septik tank. Artinya, banyak penduduk yang belum benar-benar memperhatikan kesehatan. Masalah ini jika tidak diperhatikan secara serius maka akan berdampak pada penurunan angka harapan hidup yang akhirnya berdampak pada nilai IPM.

Tabel 4.2
Capaian IPM di Jawa Timur 2009-2012

| Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| IPM | 71,06 | 71,62 | 72,18 | 72,54 |
| a. Indeks Kesehatan | 73,92 | 74,34 | 74,77 | 75,15 |
| b. Indeks Pendidikan | 74,53 | 74,98 | 75,33 | 75,73 |
| c. Indeks Daya Beli | 64,74 | 65,54 | 66,43 | 66,73 |

Kenaikan IPM diatas dikarenakan adanya berbagai program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana. Perlu disadari bahwa investasi pembangunan dalam rangka pembangunan manusia yang dipotret dalam angka IPM, hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya. Sebagai contoh usaha peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) yang dimanifestasikan dalam program wajar dikdas 9 tahun (pendidikan dasar), maka hasilnya akan terasa pada beberapa tahun kemudian

4.2.6.9 Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jawa Timur memiliki luasan lahan sawah sebesar 1.017549,73 hektar. Sebaran pemanfaatan potensi ini terwujud dalam bentuk surplus komoditas pangan yaitu beras sebesar 4,48juta ton . Meskipun demikian secara umum Jawa Timur sudah mampu mewujudkan sebagai provinsi yang berdaulat pangan, tetapi belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, dan sesuai sumber daya dan budaya dengan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin rawan pangan.

Adapun beberapa Isu Strategis pada sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Masih tingginya penduduk miskin yang tinggal di pedesaan; sebanyak 4,98 juta rumah tangga pada tahun 2013
2. Fenomena perubahan iklim global memberikan dampak terhadap capaian produksi dan produktivitas pertanian;
3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumber daya alam;
4. Belum optimalnya peran Kelembagaan petani;
5. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan system agribisnis;
6. Ketahanan Pangan;
 - a. Ketergantungan beras sebagai komoditas pangan pokok masih cukup tinggi

- b. Pola konsumsi masyarakat masih belum beragam, bergizi, seimbang dan aman
7. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian

4.2.6.10 Kemiskinan

Program-program Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya. Program-program mengentaskan kemiskinan dilaksanakan melalui dua cara, yaitu (i) mengurangi beban biaya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, seperti misalnya : biaya pendidikan, biaya kesehatan, infrastruktur seperti air bersih, jalan desa dan sebagainya, (ii) meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin dengan jalan antara lain pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulan modal kerja/ usaha, pasar desa, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui teknologi tepat guna.

Capaian penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa timur yang terus menunjukkan perbaikan, menggambarkan kesungguhan pemerintah bersama stake holder dalam upaya penanganan masalah kemiskinan. Berdasarkan data BPS (BRS 2 Januari 2014), pada tahun 2012 per bulan september jumlah penduduk miskin Jawa Timur sebanyak 4.960.540 jiwa atau 13,08%, kemudian menurun menjadi 4.865.820 jiwa atau 12,73% pada September tahun 2013, mengalami penurunan sebesar 0,35 poin persen. Meskipun demikian, capaian persentase penduduk miskin Jawa Timur ini masih diatas persentase nasional. Persentase penduduk miskin nasional pada september 2012 mencapai 11,66% dan menjadi 11,47% pada tahun 2013.

Garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 12,30% yakni dari 243.783 rupiah per kapita per bulan pada September 2012 menjadi 273.758 rupiah per kapita per bulan. Dari sisi kualitas penanganan kemiskinan, diantaranya dapat dilihat dari Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan, yakni indeks kedalaman kemiskinan dalam satu semester 2013 menunjukkan kenaikan dari 1,84 pada bulan Maret 2013 menjadi 2,07 pada September 2014, sedangkan indeks keparahan mengalami kenaikan dari 0,43 pada bulan Maret 2013 menjadi 0,5 pada bulan September 2013. Peningkatan kedua indeks ini

memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan atau semakin membutuhkan upaya yang besar untuk mengangkat mereka menjadi lebih berdaya.

4.2.6.11 Kerjasama Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah efektif dilaksanakan sejak tahun 2001, hal ini meningkatkan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan alternatif pemecahan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dan mengembangkan potensi daerah dengan lebih optimal. Disamping itu dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai keterbatasan baik keterbatasan sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menghadapi perekonomian global maka kerjasama daerah dengan Luar Negeri menjadi sangat penting, baik dalam rangka perluasan pasar ekspor maupun kerjasama investasi. Disamping itu maju mundurnya suatu daerah juga tergantung daerah-daerah lain yang berdekatan, sehingga kerjasama antar daerah dapat menjadi suatu jembatan yang dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi pembangunan yang saling menguntungkan.